



**PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENCANA KINERJA

## PENGADILAN AGAMA BONTANG

# bangga  
melayani  
bangsa



**TAHUN  
2025-2026**

 [pa-bontang.go.id](http://pa-bontang.go.id)

 [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

 (0548) 23001

 0813-5125-6098

  [pengadilanagamabontang](https://www.instagram.com/pengadilanagamabontang)

  [Pengadilan Agama Bontang](https://www.facebook.com/Pengadilan%20Agama%20Bontang)

 [Jl. Awang Long No. 69](https://www.google.com/maps/place/Jl.+Awang+Long+No.+69,+Kota+Bontang)

[Kota Bontang](https://www.google.com/maps/place/Jl.+Awang+Long+No.+69,+Kota+Bontang)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG**  
**TAHUN 2026**

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan:

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kestinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia. Untuk melaksanakan itu Pengadilan Agama Bontang telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu lembaga/kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kementerian/lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2025.

Berikut disampaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang beserta RKT 2024 dan Reviu RKT 2023 sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	97%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	85%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%
<b>KINERJA LAINNYA</b>			
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	a. Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Meningkatkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
		c. Meningkatkan Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,0
		d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90
6	Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan	Terlaksananya Penguatan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pengadilan	100%
7	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Terlaksananya program kerja dan pemenuhan evidence pembangunan zona integritas	90%

Bontang, 31 Desember 2024  
Ketua Pengadilan Agama Bontang

  
  
 Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
 NIP. 197804052009121001

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>KINERJA UTAMA</b>			
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	97%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	85%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%
<b>KINERJA LAINNYA</b>			
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	a. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Meningkatnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
		c. Meningkatnya Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,0
		d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90
6	Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan	Terlaksananya Penguatan pengawasan secara rutin terhadap kinerja pengadilan	100%
7	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Terlaksananya program kerja dan pemenuhan <i>evidence</i> pembangunan zona integritas	90%

Bontang, 31 Desember 2024  
Ketua Pengadilan Agama Bontang

  
 Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
 NIP. 197804052009121001